

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wabah penyakit asal Negera China *Corona* atau *Covid-19* telah melanda dan merebak luas di Indonesia mulai tahun 2020. Saat itu, terjadinya wabah penyakit ini atau disebut sebagai fenomena *pandemic Covid-19*. Hal ini, menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia dan menjadi perhatian publik. (Muhammad Faniawan Asriansyah, 2022).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mengumumkan wabah tidak biasa dari coronavirus atau penyakit *coronavirus* 2019 (*Covid-19*) sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Kata *pandemic* mungkin masih asing bagi sebagian orang, namun mereka merasa sesuatu yang besar sedang terjadi. Pandemi *Covid-19* tentu merupakan peristiwa yang luar biasa, dengan penyebaran virus yang sangat cepat setidaknya di 21 negara/wilayah. Per 28 Desember 2020, lebih dari 81 juta orang telah terinfeksi di seluruh dunia, dengan 1,7 juta kematian. Penyebaran yang cepat dari epidemi ini memberikan dampak negatif yang besar pada semua negara, baik dari segi kesehatan, kesejahteraan sosial dan ekonomi. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia & Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, 2021)

Perekonomian dunia saat itu kurang memiliki kepastian dan arah ekonomi yang jelas, hal ini juga berlaku untuk Indonesia. Hal ini disebabkan pandemi yang sedang berlangsung, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga beberapa negara dalam keadaan pandemi, seperti Negara di Benua Asia, Eropa dan Benua Amerika sekalipun juga mengalami perlambatan pertumbuhan

ekonomi dari yang sebelumnya. Georgieva dari WHO dalam konferensi pers mengatakan bahwasannya ini adalah sejarah dimana kita menyaksikan ekonomi dunia terhenti. (Rehia Sebayang, 2020).

Banyak yang melihat tahun 2020 sebagai tahun pemulihan ekonomi global sebelum *pandemic Covid-19* ini melanda. IMF memperkirakan bahwa ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 3,3%. Ini melampaui ekonomi global yang tumbuh 2,9% pada 2019. Padahal, meski menjadi negara yang rentan terhadap berbagai dinamika ekonomi, termasuk penurunan produktivitas, proteksionisme, dan perang dagang, tidak ada yang menyangka badai ekonomi karena masalah kesehatan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia & Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, 2021)

Peristiwa *Covid-19* mempengaruhi seluruh sektor kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mulai dari kegiatan pendidikan yang dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan atau daring (*on-line*), kegiatan perekonomian yang lumpuh dikarenakan seluruh proses pertemuan atau kerumunan dilarang atau dilakukannya kegiatan *social distancing* agar menekan angka peningkatan korban yang terdampak virus *Corona* ini. (Muhammad Faniawan Asriansyah, 2022)

Tantangan perekonomian ini tidak hanya dirasakan Pemerintah Pusat, namun juga dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang juga dirasakan oleh Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Penurunan daya beli akibat pemberlakuan aturan-aturan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdampak pada Pemerintah Daerahnya.

Hal ini dikarenakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kotamadya.

Pada saat wabah *Covid-19*, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*, pemerintah daerah mendapatkan hak khusus dalam memprioritaskan pembebanan alokasi anggaran pada tindakan khusus, penyesuaian anggaran, serta pemakaian anggaran di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. (Amal & Wibowo, 2022). Yang mana Undang-Undang ini juga pedoman untuk penerapan pelaksanaan otonomi daerah. Dimana, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan memungkinkan daerah untuk mengatur penduduknya sendiri dan menetapkan peraturan yang dirancang untuk mengatur daerahnya secara mandiri.

Untuk melihat dengan pasti bagaimana dampak langsung untuk kegiatan perekonomian di Pemerintahan Sumatera Barat khususnya Pemerintahan Daerahnya dari wabah *Covid-19* adalah dengan melihat bagaimana kinerja keuangannya, yaitu dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/wilayah dalam periode waktu tertentu. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini dilakukan Pemerintah secara berkala di tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota. Laporan ini disusun sebagaimana mestinya aturan yang diterapkan untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam melakukan tugas dalam manajemen keuangan. Analisis neraca merupakan salah satu cara melihat bagaimana kinerja

pemerintah daerah harus dilihat dan dievaluasi dalam manajemen keuangan. Menurut Mahmudi, pentingnya analisis laporan Keuangan adalah kegiatan menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan untuk menentukan kinerja keuangan. (Ichlasul Amal et al., n.d.)

Untuk menilai bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menganalisis laporan keuangannya yang dapat dilihat dengan melihat bagaimana Pendapatan Asli Daerah nya dapat ditargetkan, bagaimana ketergantungan pemerintah dapat bertahan dengan pendanaan yang bersumber dari eksternal, serta bagaimana penyerapan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi Belanja Operasi Pemerintah.

Untuk mewujudkan itu semua dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan Pemerintahan Daerah yang ada di Sumatera Barat, menggunakan rasio-rasio antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Dengan didapatnya hasil dari menganalisis rasio-rasio tersebut, maka akan didapat kesimpulan bagaimana kinerja keuangan pemerintahan daerah yang ada di Sumatera Barat. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah sangat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintahan Provinsi.

Fenomena mengenai kinerja keuangan ini dapat dilihat bagaimana pada tahun-tahun terjadinya pandemi *Covid-19* terjadi dapat dilihat juga bagaimana perekonomian di Sumatera Barat kurang adanya pergerakan. Adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menyebabkan daya tarik untuk jual beli menurun. Kawasan wisata yang menjadi salah satu sumber

pendapatan asli daerah banyak yang ditutup. Secara tidak langsung akan berdampak kepada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Muhammad Ichsanul Amal dan Puji Wibowo (2021) menyimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama seperti rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR. Adapun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi *Covid-19*. Penelitian lain oleh Azwir Nasir dan Edfan Darlis (2012) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola keuangan daerahnya belum begitu baik. Meski Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya, namun untuk Kabupaten/Kota nya masih sangat kurang baik, hal ini dapat dilihat masih tingginya transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Penelitian lain juga dipaparkan oleh Rizki Sari eka Putri dan Agus Munandar (2021) dengan hasil bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah masih rendah dan ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat masih cukup tinggi.

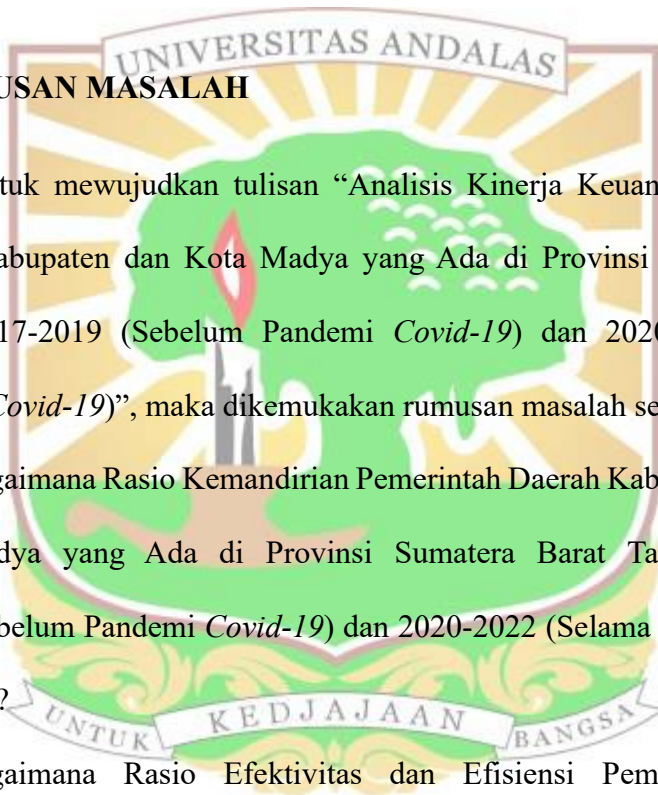
Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi lokasi, penulis mengambil *locus* atau lokasi di Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya di Provinsi Sumatera Barat begitu juga dengan periode yang diambil. Penulis mengambil periode waktu sebelum dan selama masa pandemi *Covid-19* sehingga penelitian ini dapat dianalisis secara terperinci bagaimana kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya di Provinsi

Sumatera Barat itu sendiri. Maka dari itu, skripsi akan membahas dan menganalisis serta memberikan kesimpulan bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Barat selama wabah *Covid-19* yaitu 3 tahun berlangsungnya wabah 2020-2022 dengan judul tulisan “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*)**”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Untuk mewujudkan tulisan “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*)”, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*)?
- b. Bagaimana Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*)?
- c. Bagaimana Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019



(Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*)?

- d. Bagaimana Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*)?
- e. Bagaimana Rasio *Debt Service Coverage Ratio* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*)?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melihat bagaimana Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*).
- b. Untuk melihat bagaimana Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*).
- c. Untuk melihat bagaimana Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*).

- d. Untuk melihat bagaimana Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*).
- e. Untuk melihat bagaimana Rasio *Debt Service Coverage Ratio* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*).

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Menjadi tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*).
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerahnya.
- c. Menjadi bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan data hasil kesimpulan untuk mengambil keputusan lainnya.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar mempermudah pihak-pihak terkait dalam memahami penelitian ini, maka penulisan akan dibagi ke beberapa bagian sebagai berikut:

Bab I akan berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang penulisan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, paparan tujuan dari dilakukannya penelitian ini, lalu memaparkan manfaat dari dilakukannya penelitian, batasan atau ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian, serta sistematika dari penulisan pembahasan hasil penelitian.

Bab II akan berisikan kajian dari teori dan studi literatur yang menguraikan pembahasan mengenai variabel yang akan diteliti, apa saja teori yang digunakan, faktor apa saja yang mempengaruhi, dan hasil-hasil dari kajian penelitian sebelumnya serta kerangka analisis penelitian.

Bab III akan membahas mengenai Metodologi Penelitian. Dimana akan berisi daerah, objek, data dan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian serta metode analisis yang akan digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*).

Bab IV yaitu Hasil dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian terhadap rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang didapat dari melakukan analisis rasio yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Bab V akan berisikan Kesimpulan dan Saran. Yang mana pada bab ini, akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya yang Ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019 (Sebelum Pandemi *Covid-19*) dan 2020-2022 (Selama Pandemi *Covid-19*) untuk mengelola keuangannya dalam masa transisi setelah *pandemic Covid-19*.

